

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA TERORISME

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



OLEH:
ADI KUSUMA WARDHANA
NPM. 0771010103

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN
PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

Disusun Oleh:

ADI KUSUMA WARDHANA
NPM. 0771010103

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Subani S.H MS.i
NIP. 195105041983031001

Wiwin Yulianingsih,SH., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui

DEKAN

Hariyo Sulistivantoro, S.H. MM
NIP. 196206251991031001

PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

Disusun oleh :

ADI KUSUMA WARDHANA
0771010103

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 15 Juni 2012

Pembimbing Utama

Tim Penguji
1.

Subani SH. M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001
Pembimbing Pendamping

H. Sutrisno, SH. M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001
2.

Wiwin Yulianingsih, SH. M. Kn
NPT. 37507070225

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001
3.

Subani SH. M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

Disusun oleh :
ADI KUSUMA WARDHANA
0771010103

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 15 Juni 2012

Tim Penguji :

Tanda Tangan

1. H. Sutrisno, SH. M.Hum. : (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001
2. Hariyo Sulistiyantoro, SH. MM. : (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001
3. Subani, SH. MSi. : (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Kusuma Wardhana
Tempat/ tanggal lahir : Surabaya / 16 September 1988
Npm : 0771010103
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Jl Bulak Rukem Gg 7b No 2 Surabaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME” Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar asli karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing utama

Surabaya, 11 juni 2012
Penulis

Subani S.H M.Si
Nip:195105041983031001

Adi Kusuma Wardhana
Npm:0771010103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah Nya sehingga Skripsi yang berjudul : “KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAKAN PIDANA TERORISME” dapat disusun serta diselesaikan sesuai dengan harapan penulis.

Berbagai masukan, dorongan, bimbingan, sumbangan pemikiran dan pengorbanan dari berbagai pihak sangat penulis syukuri dan hargai, oleh karenanya dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur.
2. Bapak H. Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I yang telah memberikan sumbangsih pemikiran serta saran-saran kepada penulis demi suksesnya penulisan proposal skripsi ini;
3. Bapak Drs. EC. Gendut Sukarno. Msi., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan Bimbingan dan Pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih, SH, M.Kn., dalam kedudukannya sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan serta dengan penuh kekritisan

pemikiran beliau telah memberikan dukungan serta koreksi dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan, terutama Bpk. Subani, SH., M.Si yang saya anggap sebagai kakek angkat saya sendiri;
7. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur beserta staff untuk segala pelayanan administrasinya dan Koordinator Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan atas peminjaman buku-buku;
8. Kepada para sahabat-sahabatku tercinta yang tetap setia memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian Skripsi;
9. Kedua orang tua dan adik-adik yang selama ini selalu mendoakan serta memberikan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan

Akhirnya kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, peneliti sampaikan terima kasih atas segala dukungannya.

Peneliti menyadari bahwa di dalam Skripsi ini terdapat kekurangan dan keterbatasan yang bersumber pada kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran masih penulis butuhkan demi penyempurnaan tulisan ini.

Surabaya, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Khusus	11
1.3.2. Tujuan Umum	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5. Pengertian Tindak Pidana	12
1.5.1. Pengertian Teoritis Menurut KUHP	12
1.5.2. Pengertian Teoritis Menurut Undang-Undang Teoritis	12

1.5.3. Pengertian Teoritis Menurut konversi PBB	13
1.6. Pengertian Tindak Pidana Teoritis	13
1.7. Pengertian Alat Bukti	13
1.7.1. Pengertian Alat Bukti Menurut KUHP	13
1.7.2. Pengertian Alat Bukti Menurut UU Terorisme	14
1.7.3. Pengertian Alat Bukti Menurut Konversi PBB di New York	14
1.8. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme	14
1.8.1. Menurut KUHP	14
1.8.2. Menurut UU Terorisme	14
1.9. Rekaman Video Sebagai Alat Bukti	15
1.10. Jenis Penelitian	25
1.10.1. Jenis Dan Tipe Penelitian	25
1.10.2. Sumber Data	26
1.11. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data	27
1.12. Metode Analisis Data	27
1.13. Lokasi Penelitian	27
1.14. Sistematika Penulisan	28
 BAB II SISTEM PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG TERORISME	 29
2.1. Sistem Pembuktian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana	 29

2.2. Sistem Pembuktian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme	38
2.2.1. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku Umum	40
2.2.2. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim	40
2.2.3. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis.....	42
2.2.4. Beban Pembuktian	43
2.2.5. Beban Pembuktian Biasa	44
2.2.6. Beban Pembuktian Terbalik Terbatas Atau Berimbang	44
2.2.7. Beban Pembuktian Terbalik Atau Pembalik Beban Pembuktian.....	45

BAB III BENTUK REKAMAN VIDEO YANG BISA MEMENUHI UNSUR SISTEM PEMBUKTIAN

3.1. Alat Bukti Elektronik (Electronic Evidence) Sebagai Alat Bukti Yang Sah	47
3.2. Definisi Perkembangan Dan Cara Kerja Rekaman Video	50
3.2.1. Definisi Rekaman Video (Video Kamera Recorder) menurut Qulman	50
3.2.2. Perkembangan Video Di Indonesia	51
3.2.3. Cara Kerja Video	51

3.3. Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Dalam	
Penanganan Tindak Pidana Terorisme	53
3.3.1. Penggunaan Bukti Digital Dalam Perkara Tindak Pidana	
Terorisme Telah Diakomodir Dalam Pasal	55
Huruf b Dan c	56
3.3.2. Unsur Tindak Pidana Dalam Rekaman Video	59
3.3.2.1. Sengaja Atau Kesengajaan	60
3.3.2.2. Unsur Setiap Orang	63
3.3.2.3. Rekaman Video Sebagai Alat Bukti	
Demonstrative	65
3.3.2.4. Syarat-syarat Alat Bukti Demonstrative	70
BAB IV PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan sumber pakar hukum
- Lampiran 2 : Jurnal Hukum
- Lampiran 3 : Gambar Video terorisme
- Lampiran 4 : Karu bimbingan skripsi

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Adi Kusuma Wardhana
Npm : 0771010103
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 16 September 1988
Program Study : Pidana
Judul Skripsi :

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
TERORISME

ABSTRAKSI

Penelitian Ini bertujuan untuk memberikan gambaran penggunaan bukti di sidang berupa rekaman video dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap hakim dan kades tempat terjadinya perkara. Analisa data yang digunakan menggunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta social yang timbul di masyarakat. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Yang mana kasus tersebut diatur dalam undang-undang no 15 tahun 2003 tentang terorisme, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, dimana hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan juga korban agar nilai-nilai hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Kata kunci: Rekaman video, Terorisme, Tindak Pidana Khusus.

ABSTRACT

This research aims to provide an overview of the use of evidence at trial video recordings in the proof of criminal procedural law in Indonesia. This study uses sociological research methods juridical, the data obtained from literature sources, laws and interviews with judges and village heads the scene of the crime. Data analysis used the data using descriptive analysis examines the social facts that arise in society. These include descriptive content and structure of the positive law is an activity undertaken by the authors to determine the content and meaning of the rule of law is used as reference in resolving legal issues that become the object of study. Which case is governed by law No. 15 of 2003 on terrorism, the judge must explore, follow and understand the legal values of life and sense of justice in society, where the judge before dropping a decision must consider the sense of justice for the accused and the victim for legal values can be run in accordance with its purpose.

Keywords: video recording, Terrorism, Crime Special

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah terorisme memang masih tergolong ‘baru’, istilah ini kali pertama muncul pada 1789 didalam The Dictionaries of the Academic Francaise “System, Regiene de terreur”. Konteks revolusi Prancis lekat didalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang digunakan untuk menggulingkan penguasa yang lalim, dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan.¹

Tetapi, praktek-praktek terorisme sudah lama terjadi, sejak sekitar 66-67 sebelum masehi, ketika kelompok ekstrim Yahudi melakukan berbagai aksi teror, termasuk didalamnya pembunuhan, terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya (kira-kira di wilayah yang dipersengketakan oleh Israel dan Palestina sekarang). Sejak saat itu aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi.²

Aksi-aksi terorisme di Indonesia memiliki frekuensi yang meningkat pesat pasca keruntuhan pemerintahan orde baru. Hal ini terlihat dari adanya aksi pengeboman di sejumlah kota seperti di Jakarta, Medan, Makasar dan kota-kota lainnya. Di antara aksi terorisme itu yang paling menyentuh perhatian adalah kasus pengeboman Bali 12 Oktober 2002. Hal ini tidak

¹ Kacung Marijan, Suatu Pengantar, ”Terorisme dan Pesantren”, Islam Lunak Islam Radikal November, 2003 . hal 5.

² Ibid. hal 5.

lepas dari fakta bahwa dari dalam aksi ini Bali (Indonesia) hanyalah menjadi sasaran antara (indirect target) dari aksi itu sasaran sesungguhnya, seperti diakui para pelakunya adalah barat.

Tentu saja implikasi dari aksi pengeboman di Bali itu tidak hanya berkaitan dengan Barat, khususnya Australia. Indonesia yang menjadi sasaran tidak langsungnya juga terkena implikasi yang sangat besar. Implikasi positifnya, kalau bisa disebut demikian adalah pemerintah terlihat serius untuk melakukan pemberantasan teroris di Indonesia. Langkah serius itu terlihat dari disahkannya Peraturan Pemerintah Tentang Bom Bali hanya kurang dari seminggu setelah kasus pengeboman itu yakni pada 18 Oktober 2002. Melalui Perpu ini tidak hanya pelaku para pelaku teror saja yang diancam hukuman berat. Aparat keamanan diberi kewenangan besar untuk melakukan penanganan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai teroris.³

Sejalan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara perdamaian dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

³Ibid.. hal 7.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Sistem perekrutan yang dilakukan para pelaku teror di Indonesia adalah melalui keyakinan, cara indoktrinasi dan brain washing biasa dilakukan dengan gerakan sel bawah tanah, selanjutnya dilakukan pengamatan penggambaran untuk menentukan titik sasaran. Aliran dana gerakan teroris tersebut di peroleh dari merampok di Bank.⁴

Karena itu, Persoalan besar dalam memberantas terorisme bukan sekedar menangkap dan mengadili, tetapi bagaimana mengatasi pemikiran keagamaan mereka yang bercorak terorisme. Para alumni Taliban sangat mungkin membutuhkan terorisme sebagai bahasa politik perlawanan.⁵

terlebih ketika melihat sikap AS terhadap islam yang dinilai tidak fair. Motif lain yang memunculkan tindakan terror adalah separatisme yang diakibatkan oleh nasional kesukuan yaitu munculnya semangat ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat demi mendapatkan kemerdekaan politik, kelompok seperti ini tak segan melakukan tindakan

⁴ Wawan Purwanto, Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Grafindo, Jakarta 2004. hal. 15

⁵ Bambang Abimanyu, Teror Bom di Indonesia, Jakarta 2005. Hal 134

terror. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan sosial juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya terorisme.⁶

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka / terdakwa.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kejadian Bom Bali merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan-perundang-undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya di singkat KUHP dan KUHP).

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

⁶ ibid. Hal 135

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber law, secara Internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal dan global (intern) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi dan/atau transaksi secara elektronik, khusus dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertahankan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat

bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Kenyataannya kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dimana pun.

Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik. Pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi seringkali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan, diantara ragam kejahatan itu menggunakan teknologi didalamnya terdapat kejahatan teroris baru yaitu cyber terrorism, penanganan cyber terrorism berbeda dengan penanganan terorisme konvensional, perbedaannya adalah penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik.⁷

Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah munculnya kejahatan teroris baru yaitu cyber terrorism, tentu saja upaya penegakan hukum tidak boleh berhenti karena ketidakadaan hukum yang mengatur penggunaan barang bukti dan alat bukti berupa informasi elektronik di dalam suatu penyelesaian peristiwa hukum.⁸

Perkembangan video saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini turut didukung dengan hadirnya sebagai aplikasi pengolah video yang dapat menghasilkan efek-efek menarik dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan media rekam seperti camcorder, handycam dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas merekam audio bukan hal baru bagi kebanyakan orang.⁹

⁷ Ahmad Zakaria, Source Code (Kode Sumber) Website Merupakan Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007, hal.7.

⁸ Muhammad Labib dan Abdul Wahid, Kejahatan Mayantara (cyber crime), Rafika Aditama, Bandung 2005, hal. 26.

⁹ Wahana Komputer, Video editing dan video production, Prakata, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal.5.

Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Pasukan khusus berompi merah ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.

Detasemen 88 dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45 - 75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktifitas teror di daerah. Melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara R.I.

Densus 88 adalah salah satu dari unit anti teror di Indonesia, disamping Detasemen C Gegana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) TNI AD alias Grup 5 Anti Teror, Detasemen 81 Kopasus TNI AD (Kopasus sendiri sebagai pasukan khusus juga memiliki kemampuan anti teror), Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Korps Marinir TNI AL, Detasemen Bravo (Denbravo) TNI AU, dan satuan anti-teror BIN. Satuan

ini diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Firman Gani pada tanggal 26 Agustus 2004. Detasemen 88 yang awalnya beranggotakan 75 orang ini dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Tito Karnavian yang pernah mendapat pelatihan di beberapa negara.

Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28). Undang-undang tersebut populer di dunia sebagai "Anti Teror Act". Angka 88 berasal dari kata ATA (Anti Terror Act), yang jika dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi Ei Ti Ekt. Pelafalan ini kedengaran seperti Eighty Eight (88). Jadi arti angka 88 bukan seperti yang selama ini beredar bahwa 88 adalah representasi dari jumlah korban bom bali terbanyak (88 orang dari Australia), juga bukan pula representasi dari borgol.

Pasukan khusus ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui bagian Jasa Keamanan Diplomatik (Diplomatic Security Service) Departemen Luar Negeri AS dan dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan U.S. Secret Service. Kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota pasukan khusus AS. Informasi yang bersumber dari FEER pada tahun 2003 ini dibantah oleh Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Divisi Humas Polri, Kombes Zainuri Lubis, dan Kapolri

Jenderal Pol Da'i Bachtiar. Sekalipun demikian, terdapat bantuan signifikan dari pemerintah Amerika Serikat dan Australia dalam pembentukan dan operasional Detasemen Khusus 88. Pasca pembentukan, Densus 88 dilakukan pula kerjasama dengan beberapa negara lain seperti Inggris dan Jerman. Hal ini dilakukan sejalan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 43.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas telah diketahui bahwa perkembangan terorisme mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang teknologi. Perkembangan ini telah menyebabkan pergeseran dari kejahatan teroris yang konvensional ke kejahatan teroris yang modern. Demi tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta menjadi langkah preventif dan represif terhadap kejahatan terorisme, dengan demikian dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembuktian dalam pengungkapan tindak pidana terorisme menurut KUHAP dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme?
2. Bagaimana bentuk Rekaman video yang bisa memenuhi unsur sistem pembuktian?

⁹ [http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_\(Anti_Teror\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror))

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Khusus

Penelitian ini adalah memberikan gambaran penggunaan bukti digital (digital evidence) berupa rekaman video dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini untuk mengakomodir semakin canggihnya tindak pidana yang menggunakan teknologi digital, seperti cyber terrorism.

1.3.2 Tujuan Umum

Untuk mengetahui sistem pembuktian rekaman video dalam tindak pidana terorisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan hasil rekaman video sebagai bukti digital dalam tindak pidana terorisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sarana pengetahuan umum tentang tindak pidana terorisme bagi masyarakat khususnya mengenai alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Terorisme.

1.5 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

1.5.1 Pengertian Terorisme Menurut KUHP

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas international.

1.5.2 Pengertian Terorisme Menurut Undang-Undang Terorisme

Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana karena terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

1.5.3 Pengertian Terorisme Menurut Konvensi PBB

Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan .

1.6 Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan politik, agama atau ideologi yang mengancam masyarakat atau keamanan nasional dengan pembunuhan, secara serius menyakiti atau membahayakan seseorang, menyebabkan hak milik menjadi rusak secara serius, menyakiti atau dengan mengganggu barang-barang yang berguna, fasilitas atau system.

1.7 Pengertian Alat Bukti

1.7.1 Pengertian Alat Bukti Menurut KUHAP

Perluasan pengertian alat bukti yang sah dalam KUHAP sesuai dengan perkembangan teknologi telah diatur dalam pasal 26 A UU No.31 Tahun 1999 yaitu:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, khususnya untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

1.7.2 Pengertian Alat Bukti Menurut UU Terorisme

Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

1.7.3 Pengertian Alat Bukti Menurut Konvensi PBB di New York

Suatu bukti informasi yang terdapat pada tindakan terorisme dalam hal intelejen.

1.8 Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme

1.8.1 Menurut KUHP

Menurut pasal 242 KUHP sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme ialah pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

1.8.2 Menurut UU Terorisme

Menurut UU Terorisme No 15 tahun 2003 sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme ialah pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

1.9 Rekaman Video Sebagai Alat Bukti

Alat bukti fisik, baik yang diperagakan di pengadilan maupun yang hanya dibawa untuk ditunjukkan kepada hakim di pengadilan. Semakin lama, modelnya semakin banyak, termasuk diantaranya pemakaian rekaman kamera tersembunyi, rekaman gambar, rekaman video yang tersembunyi ataupun yang sengaja dibuat melalui alat perekam gambar, video atau suara. Mau tidak mau, pengadilan harus dapat menerima bukti-bukti seperti itu sebagai alat bukti di pengadilan terutama dalam tindak pidana terorisme, dengan batasan-batasan tertentu, baik dengan bantuan saksi ahli maupun tanpa saksi ahli tidak salah untuk dipertimbangkan penggunaannya sebagai bukti di pengadilan.

Video dapat digunakan sebagai bukti atau dapat memberikan kekuatan pembuktian dengan argumen untuk kesalahan identitas atau hal-hal yang beralasan. Semua video harus relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mendapatkan otentifikasi dari sebuah video, video harus menjelaskan tentang bagaimana video itu dibuat bahwa, video itu dilihat secara pribadi, jelas dan akurat yang menggambarkan secara jelas apa yang terjadi tentang suatu tindak pidana. Keberadaan sebuah rekaman video yang diduga kegiatan tindak pidana membawa beberapa masalah hukum di persidangan. Apakah video itu relevan untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan? Apakah video sudah benar otentik? Apa sebenarnya arti menayangkan video tersebut?

Bukti berupa rekaman video dapat diterima jika bukti ini dapat memberikan nilai pembuktian. Hal ini dapat memperjelas fakta yang ada daripada hanya menjadi sumber praduga atau sumber persuasive bagi hakim. Pemakaian bukti berupa rekaman video mempercepat orang untuk terbawa emosi, seperti menjadi simpati atau antipati secara berlebih-lebihan sehingga menjadi misleading (Menyesatkan). Di samping itu, menimbulkan unsur menunda-nunda waktu atau unsur menyebabkan kebingungan karena terjadi keterkejutan.

Pemakaian bukti berupa rekaman video sudah sepatutnya diterima oleh hakim untuk diperagakan di pengadilan tetapi penerimaannya di pengadilan sebagai model pembuktian tetap harus diperhatikan dengan penuh kehati-hatian. Ada beberapa ketentuan dasar yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan alat bukti berupa rekaman video adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan Hukum Terhadap data Elektronik

Dalam hal ini ditentukan bahwa siapapun, termasuk pengadilan tidak boleh menolak efek hukum, validitas hukum, dan pelaksanaan hukum semata-mata karena hal tersebut merupakan data elektronik.

2. Otentifikasi

Otentik disini adalah bawa alat bukti berupa rekaman video di pengadilan harus menggambarkan alat bukti yang sebenarnya. Harus ada alat bukti lain tentu saja alat bukti yang diperagakan atau ditiru tersebut harus tersedia.

3. Identifikasi

Yang diperagakan di pengadilan sebagai alat bukti berupa rekaman video harus sama persis dengan alat bukti sebenarnya yang dipresentasikan. Jika digambarkan sebuah segitiga sama kaki, padah yang dimaksud segitiga siku-siku, diantara keduanya sudah tidak lagi identik.¹⁰

Pada sebuah proses penyelesaian tindak pidana, proses pembuktian merupakan suatu proses kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana.

Menurut Pasal 184 KUHAP kita mengenal adanya alat bukti yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Adapun Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disingkat PP Nomor.1 tahun 2002)

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor.1 tahun 2002 yang dimaksud dengan :

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

¹²Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, h.190.

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pasal 2

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Di dalam penjelasan umum Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 2002; Bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman

serius terhadap kedaulatan setiap Negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sehubungan dengan adanya tindak pidana terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 serta adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Republik Indonesia berdasarkan pasal 22 ayat (1) undang-undang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat undang-undang dasar 1945 perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 oktober 2002.

Di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2002 tentang penanganan terorisme menginstruksikan kepada Menteri Negara Koordinator bidang politik dan keamanan untuk :

- Pertama : Merumuskan kebijakan yang kompeherensif dan terpadu bagi pemberantasan tindak pidana terorisme termasuk pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 oktober 2002, secara terkoordinasi dengan dan diantara seluruh instansi yang secara fungsional memiliki tugas dan kewenangan di bidang tersebut, serta menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan bagi pemberantasannya oleh instansi-instansi termasuk secara cepat, terpadu dan efektif.
- Kedua : Mengajukan kepada dan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, seluruh nrancangan kebijakan dan langkah-langkah operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam rangka pengungkapan secara jelas dan tuntas, latar belakang dan rencana setiap kegiatan terorisme, jaringan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaannya, ataupun bagi penangkapan pelaku dan pihak lain yang tersangkut di dalamnya serta pengambilan segala tindakan hukum yang diperlukan bagi penyelesaiannya.
- Ketiga : Mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan selalu berupaya mewujudkan, memelihara kesatuan, keterpaduan dan keharmonisan pelaksaan kegiatan operasi pemberantasan tindak pidana terorisme yang secara fungsional dilakukan oleh berbagai instansi terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing
- Keempat : Menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden
- Kelima : Membentuk sebuah satuan kerja yang bersifat structural dan berada di lingkungan secretariat kantor Menteri Negara coordinator bidang politik dan keamanan guna mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas ini, yang susunan dan tata kerja nya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator bidang politik dan kemanan.
- Keenam : Melaksanakan instruksi presiden ini secara cermat dan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada presiden.

Di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2002 tentang Badan Intelijen Negara menjelaskan tugas pokok Badan Intelijen Negara antara lain:

- Pertama: Sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden nomor 46 tahun 2002, melakukan pengkoordinasian pelaksanaan operasional kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya, yang menyelenggarakan fungsi tersebut sebagai bagian atau untuk mendukung tugas penyelenggaraan tugas masing-masing.
- Kedua: Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mewujudkan, membina, dan menjaga keutuhan dan keterpaduan rencana dan gerak operasional intelijen, baik dalam kerangka institusi maupun di antara aparatnya, sehingga seluruh instansi tersebut dapat merupakan satu kesatuan masyarakat intelijen Indonesia yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama maupun bekerja secara efisien dan efektif.
- Ketiga: Melaksanakan instruksi Presiden ini dengan cermat dan bertanggung jawab, serta secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menyampaikan laporan kepada Presiden.

Perkembangan teknologi dan hukum seharusnya berjalan beriringan, perkembangan ini telah menyebabkan pergeseran dari media cetak ke media digital dari dokumen yang konvensional ke dokumen elektronik seperti video sebagai *lex specialis*, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme) memiliki kekhususan secara formil di banding KUHAP. Salah satu kekhususannya tersebut adalah terkait penggunaan

alat bukti yang merupakan pembaharuan proses pembuktian konvensional dalam KUHAP.

Pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 27 UU Terorisme alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

1. Alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan,
3. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik.

Termasuk tidak terbatas pada :

1. Tulisan, suara atau gambar
2. Peta, rancangan, foto dan sejenisnya
3. Huruf, tanda, angka, simbol atau perfoliasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Kegiatan terorisme internasional sudah terbukti sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara dimana korban mati atau luka berat sangat banyak dan kerusakan bangunan dan fasilitas publik tidak dapat dihindarkan sehingga sulit untuk tidak memberikan beban pertanggungjawaban yang sangat berat terhadap para pelaku terorisme internasional tersebut. kegiatan terorisme internasional telah diatur dalam beberapa konvensi internasional menentang terorisme internasional dan pemerintah Indonesia termasuk negara penandatangan konvensi internasional tentang pemberantasan pendanaan untuk terorisme(1999) dan terikat kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 tahun 2001 terkait pendanaan terorisme. Badan-badan dalam sistem PBB, seperti Terrorism Prevention Branch United Nations Office on Drugs and Crime

(TPB-UNODC), United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED), United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (UNCTITF) telah melakukan berbagai upaya penanggulangan terorisme dan menyediakan bantuan teknis bagi negara anggotanya khususnya dalam rangka ratifikasi dan implementasi sejumlah instrumen hukum terkait pemberantasan terorisme dan implementasi resolusi-resolusi PBB. United Nations S/RES/1373 (2001)¹¹

Isi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Memutuskan bahwa semua Negara harus:
 - (a) Mencegah dan menekan pendanaan kegiatan teroris;
 - (b) Mengkriminalisasi penyediaan disengaja atau koleksi, dengan cara apapun, langsung maupun tidak langsung dana oleh warga negara mereka atau di wilayah mereka dengan maksud bahwa dana harus digunakan, atau dalam sepengetahuan bahwa mereka akan digunakan, untuk melakukan tindakan teroris;
 - (c) Freeze tanpa penundaan dana dan aset keuangan lainnya atau sumber daya ekonomi dari orang yang melakukan, atau mencoba untuk melakukan, tindakan teroris atau berpartisipasi dalam atau memfasilitasi tindakan-tindakan teroris; entitas yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh orang tersebut; dan orang dan entitas yang bertindak atas nama atau atas petunjuk orang-orang tersebut dan entitas, termasuk dana yang berasal atau dihasilkan dari properti yang dimiliki atau dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh orang-orang tersebut dan orang-orang terkait dan entitas;
 - (d) Melarang warga negara mereka atau orang dan entitas dalam wilayah mereka dari membuat dana, aset keuangan atau sumber daya ekonomi atau keuangan atau layanan terkait lainnya yang tersedia, secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan orang yang melakukan atau mencoba melakukan atau memfasilitasi atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan teroris, entitas yang dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh orang-orang tersebut dan orang-orang dan entitas yang bertindak atas nama atau atas petunjuk orang-orang tersebut.

¹¹ <http://www.deplu.go.id/Lists/InternationalIssues/DispForm.aspx?ID=25&l=en>

Ada dua pandangan terhadap kegiatan terorisme yang berkembang saat ini yaitu pertama, terorisme merupakan kegiatan yang bersifat politik, baik memiliki latarbelakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik. Pandangan lain, adalah bahwa kegiatan terorisme merupakan kegiatan kriminal yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan dan perdamaian bangsa-bangsa. Kedua pandangan yang berbeda secara mendasar tersebut sudah tentu juga membawa perbedaan mengenai cara-cara pemberantasannya. Pandangan yang pertama sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan terorisme perlu diungkapkan akar dari masalah terorisme. Pandangan kedua, sering disampaikan dengan justifikasi "perlindungan global umat manusia" (global protection for humankind). Kedua pandangan tersebut akan mempengaruhi setiap undang-undang yang akan digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

Pandangan yang pertama sudah tentu tidak akan setuju dengan undang-undang yang bersifat represif karena masalah ketidakadilan yang menjadi akar masalah terorisme tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan menahan, menuntut dan memenjarakan pelakunya, melainkan yang harus diutamakan adalah langkah-langkah yang bersifat preventif. Langkah ini antara lain bagaimana mengurangi atau menghilangkan ketidakadilan tersebut dalam masyarakat atau ketidakadilan dalam masyarakat internasional. Berbeda dengan pandangan yang pertama,

pandangan yang kedua justru, berpendapat bahwa masalah terorisme harus dihadapi dengan pencegahan yang bersifat premitif dan secara langsung menuntut dan menghukum para pelakunya setimpal dengan tindak pidananya. Di dalam merumuskan tindak pidana terorisme atau yang dapat digolongkan ke dalam tindak pidana terorisme masyarakat internasional sudah sepakat bahwa tindak pidana terorisme adalah yang telah ditetapkan dalam konvensi internasional atau "genuine acts of terrorism" dan tindak pidana lain yang secara tidak langsung digolongkan ke dalam tindak pidana terorisme atau "affirmative crimes" Namun demikian sampai saat ini belum disepakati satu "comprehensive convention on combating terrorism"; yang ada adalah konvensi yang bersifat partial dan khusus mengenai subjek tertentu. Di samping itu sudah ada Konvensi Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme yang telah disusun dan diadopsi oleh Konferensi Negara-negara Islam (OKI); di samping Konvensi Uni Eropa dan Konvensi Negara Amerika Latin dalam topik pemberantasan Terorisme.¹²

1.10 Jenis Penelitian

1.10.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu type penelitian hukum yang difokuskan

¹² Atmasasmita, Romli, Majalah Hukum Nasional, No.1, Jakarta 2004.hal 3.

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³

1.10.2 Sumber Data

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum normative yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normative.¹⁴

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Peraturan perundang-undangan RI.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa :

- Buku-buku Ilmu Hukum
- Jurnal Ilmu Hukum
- Laporan Penelitian Ilmu Hukum
- Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

¹³ Ibrahim Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang. 2010, hal.295

¹⁴ Bahder Johan nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. 2008, hal. 86

Merupakan bahan hukum sebagai perangkat dari kedua bahan hukum sebelumnya terdiri dari :

- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.11 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan dan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistimatisasi, kemudian dianalisis untuk meneginterpretasikan hokum yang berlaku.

1.12 Metode Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hokum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hokum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hokum yang menjadi objek kajian.¹⁵

1.13 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang di pilih sebagai penelitian adalah Polrestabes Surabaya.

¹⁵ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 107.

1.14 Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang mengemukakan masalah pokok yang merupakan isi penulisan skripsi secara garis besar saja agar pembaca dengan mudah dapat memahami. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian baik Tujuan Umum Maupun Tujuan Khusus, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II membahas mengenai sistem pembuktian dalam pengungkapan tindak pidana terorisme menurut KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) dan menurut undang-undang terorisme.

Bab III membahas tentang rekaman video sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan undang-undang terorisme. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang prospektif alat bukti elektronik (elektronik evidence) sebagai alat bukti yang sah, arti, cara kerja, dan perkembangan video, serta rekaman video sebagai alat bukti dipersidangan

Bab IV adalah bab penutup, dalam bab ini penulis ingin memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan rekaman video sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan undang-undang terorisme.